PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH



Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran | (0623) 347-924
Email : bpbdkab.asahan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 mendatang. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka meningkatkan etos kerja dalam penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024. Semoga semua Rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Kami juga menerima saran dan kritik demi sempurnanya Rencana Kerja ini.

Akhirnya, kepada Tuhan YME, kita berserah diri seraya berdo'a semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan mendapat izin dan RidhoNya. Amin

Kisaran, 28 Juli 2023.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

HARRY NALDO TAMBUNAN, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 19641224 199003 1 004.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
BAB I.	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1	Latar belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		12
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
	2.5	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		28
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	29
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**		31
	4.1	Program Kerja	31
	4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja	32
	4.3	Alokasi Anggaran	32
BAB V	**PENUTUP**		33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1) Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2) Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3) Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4) Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

5) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Asahan. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 adalah Program dan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, yaitu : **Program Penanggulangan Bencana**.

a. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika :

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
e. Penutup.

b. Keterkaitan antara Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu : Dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
    1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud.

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan 2021 – 2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah.
b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tahun 2024 untuk menghasilkan sebagai berikut :

a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan Tahun 2024 dalam Bidang Kebencanaan.
b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Asahan Tahun 2024.
c. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Organisasi Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

  1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah **Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasarantahunan dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab/Kota (bila sudah dilakukan)

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain :
  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun,

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, missal :
  - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
  - Pencapaian MDGs
  - Pengentasan kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - Pengembangan daerah terisolir
  - dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB IV. : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung perkantoran/manajerial.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, missal :
  - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
  - Pencapaian MDGs
  - Pengentasan kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
  - Pengembangan daerah terisolir
  - dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V : PENUTUP.

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BPBD KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2022.

a. Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dilakukan dengan melihat Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 disajikan dalam lampiran.

(terlampir Hasil evaluasi renja tahun 2022 …….)

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD pada tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
			BIDANG URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																								
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
			I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																								
			1 Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 Dok	69.803.500	4 Dok	18.278.750	3 Dok	27.101.825	1 Dok	2.247.253	1 Dok	-		-		24.813.050	2 Dok	27.060.303	66,67	99,85	6 Dok	45.339.053	0,00	100,00	BPBD
			2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	230.696.000	3 Lap	35.025.575	4 Lap	68.669.900	1 Lap	6.219.375	1 Lap	9.912.400		7.098.100		45.185.100	2 Lapor	68.414.975	50,00	99,63	5 Laporan	103.440.550	0,00	44,84	BPBD
			2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	132 Org	15.423.267.828	1 tahun	3.637.273.019	22 org	2.755.879.707	20 org	496.529.099	20 org	740.109.439		633.631.406		724.003.253	40 Org	2.594.273.197	181,82	94,14	41 Org	6.231.546.216	0,00	100,00	BPBD
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 Lap	25.821.375	1 Lap	4.303.000	1 lap	4.303.675	0 lap	-	0 lap	-		-		4.285.000	- Dok	4.285.000	-	99,57	1 Laporan	8.588.000	0,00	100,00	BPBD
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	102 Lap	105.784.375	12 Lap	26.710.500	18 lap	43.175.375	3 lap	1.808.300	3 lap	4.459.000		-		36.673.500	6 Lapor	42.940.800	33,33	99,46	18 Laporan	69.651.300	0,00	100,00	BPBD
			4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dok	10.000.000																	Dok				
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah																								
			1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	218 Pak	143.906.250													- Paket	-	-	0,00	- Paket/O	-	0,00	0,00	BPBD
			2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dok	7.500.000																	Dok				
			3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai dalam pelatihan teknis/diklat/kursus	20 Org	200.000.000													- Org	-	-	0,00	- Org	-	0,00	0,00	BPBD
			4. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	75.000.000																					
			5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org	250.000.000																					
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangann bangunan kantor	17 Pak	85.826.664	12 bln	30.314.970	12 pkt	46.392.100	3 pkt	11.438.780	3 pkt	11.707.000		7.763.500		15.477.000	6 Paket	46.386.280	50,00	74,55	6 Paket	34.584.560	8,33	40,30	BPBD
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Pak	202.413.252,10	12 bln	67.755.125	12 pkt	89.306.350	3 pkt	21.908.650	3 pkt	22.211.500		14.647.500		30.503.100	6 Paket	89.270.750	50,00	73,94	6 Paket	66.028.800	8,33	27,24	BPBD
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	17 Pak	106.435.848	12 bln	27.547.182	12 pkt	23.299.736	3 pkt	5.700.543	3 pkt	5.744.450		4.104.700		7.730.250	6 Paket	23.279.943	50,00	73,59	6 Paket	17.145.536	8,33	16,11	BPBD
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	17 Pak	220.625.000	12 bln	25.000.000	12 pkt	34.125.000	3 pkt	8.190.000	3 pkt	-		14.332.500		11.602.500	6 Paket	34.125.000	50,00	48,00	6 Paket	16.380.000	8,33	7,42	BPBD
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	17 Pak	64.270.060	12 bln	24.153.279	12 pkt	57.328.900	3 pkt	14.324.625	3 pkt	14.262.200		9.658.100		19.066.100	6 Paket	57.311.025	50,00	74,85	6 Paket	42.911.450	8,33	66,77	BPBD
			6. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	17 Dok	90.090.000	12 bln	14.030.000	12 dok	10.164.000	3 dok	-	3 dok	4.650.000		1.710.000		3.710.000	6 Dok	10.070.000	50,00	45,75	6 Dok	4.650.000	8,33	5,16	BPBD
			7. Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	18 Pak	307.205.700		-	3 pkt	-	pkt	-	pkt	-		-		-	- Paket	-	0,00	0,00	0 Paket	-	0,00	0,00	BPBD
			8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Lap	580.329.020	12 bln	126.054.305	26 lap	122.754.000	2 lap	18.342.200	2 lap	36.537.244		31.768.400		36.028.539	4 Lapor	122.676.383	15,38	59,65	4 Laporan	73.221.644	2,96	12,62	BPBD
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
			1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	4 unit	90.000.000													- unit	-	0,00	0,00	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
			2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	180.000.000													- unit	-	0,00	0,00	0 unit	-	0,00	0,00	BPBD
			3. Pengadaan Mebel	Meubeler yang diadakan	9 unit	59.118.000	5 unit	12.468.000	9 unit/je	20.825.000	unit/jenis		unit/je	20.645.000		-		-	- unit/je	20.645.000	0,00	99,14	0 unit/jens	20.645.000	0,00	0,00	BPBD
			4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Yang Diadakan	29 unit	585.843.119			29 unit/je	114.442.800	unit/jenis		unit/je	113.182.000		-		1.210.000	- unit/je	114.392.000	0,00	74,22	0 unit/jens	113.182.000	0,00	19,32	BPBD
			5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	101.010.000			1 unit	101.010.000	unit		unit	100.128.000		-				100.128.000							
			6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11 unit	282.587.000	11 unit	108.961.800	1 unit	-	unit		unit	-						-							
			6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	17 Lap	26.999.000	12 bln	4.500.000	12 lap	4.500.000	lap		lap	1.875.000		-		2.625.000	- Lap	4.500.000	-	100,00	12 Lap	9.000.000	0,00	0,00	BPBD
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 Lap	336.517.488	12 bln	58.702.050	12 lap	80.209.596	3 lap	11.950.761	3 lap	16.132.854		15.641.194		30.897.742	6 Lap	74.622.551	50,00	93,03	18 Lap	133.324.601	105,88	39,62	BPBD
			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Lap	40.000.000		-																			
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Lap	770.768.800	12 bln	78.600.000	12 lap	97.733.760	3 lap	13.100.000	3 lap	23.270.520		6.550.000		50.521.496	6 Lap	93.442.016	50,00	95,61	18 Lap	172.042.016	105,88	22,32	BPBD
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12		13		14		15		16
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102 unit	1.633.023.597	12 bln	235.701.041	17 unit	346.644.500	unit	13.581.444	unit	56.886.696		76.656.699		187.635.794	- unit	334.760.633	-	96,57	12 unit	570.461.674	11,76	34,93	BPBD
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	7 unit	658.872.725	2 unit	308.510.000	1 unit	37.830.000	unit	4.950.000	unit	12.710.000		7.630.000		12.540.000	- unit	37.830.000	-	100,00	2 unit	346.340.000	28,57	52,57	BPBD
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 unit	238.070.000	12 bln	48.920.000	3 unit/j	111.293.750	unit/jns		unit/j	69.655.150				41.421.200	- unit/je	111.076.350	-	99,80	12 unit/jenis	159.996.350	66,67	67,21	BPBD
		II PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																							
		1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																							
		1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kajian risiko bencana kabupaten/kota	5 Dok	1.004.870.000																				
		2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Peserta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	2350 Org	3.218.936.585	100 org	56.998.300	1200 org	219.157.330	1200 org	150.233.030		-				68.446.664	1.200 Org	218.679.694	100,00	99,78	1.300 Org	275.677.994	55,32	0,00	BPBD
		2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																							
		1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	5 Dok	250.000.000																				
		2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	500 Org	450.000.000				59.447.300								56.178.700	- Keg	56.178.700	-	94,50	- Org	56.178.700	0,00	0,00	BPBD
		3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 Dok	500.000.000													- Keg	-	-	0,00	- Keg	-	0,00	0,00	BPBD
		4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	8 Unit	738.430.988			1 Unit/j	49.306.226	Unit/jenis		Unit/j	49.260.000		-			- Dok	49.260.000	-	99,91	- Dok	49.260.000	0,00	0,00	BPBD
		5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	6 Dok	780.922.805	1 dok	35.775.000	1 dok	27.874.250	dok		dok	19.358.400		-		7.726.650	- Bln	27.085.050	-	97,17	1 Bln	62.860.050	16,67	8,05	BPBD
		6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kaw	250.000.000																				
		7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/K	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	250 Ora	500.000.375			50 org	53.522.000	org		org	-		-		53.189.112		53.189.112							
		8. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 Dok	200.000.000																				
		9. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Org	316.562.125																				
		10. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	2 Dok	220.000.000																				
		11. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Kelu	100.000.000																				
		3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																							
		1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5 Lap	50.000.000																				
		2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dok	2.971.678.770	2 keg	440.165.310	2 dok	492.195.900	2 dok	49.992.000	2 dok	111.613.000		106.808.300		218.628.089		487.041.389							
		3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	187.550 Org	1.059.524.000	95 kej	137.655.116	37.491 org	143.242.250	org		org	25.611.500		25.156.000		92.091.800		142.859.300							
		4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1457 Org	1.260.076.250	12 bln	299.294.400	289 org	343.769.000	org		org	87.028.160		39.675.670		151.238.430		277.942.260							
		5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5 Lap	135.000.000																				
		6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6 Dok	402.053.000	1 keg	1.628.207.378																			
		4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																							
		1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4 Dok	66.000.000																				
		2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	125 Dok	250.000.550																				
		3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	125 Dok	125.000.000																				
		4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4 Dok	66.000.000																				

1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Lap	46.540.108																				
					6. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencanan (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12 Dok	1.380.118.475	2 keg	306.656.000	2 dok	227.332.175	dok			84.858.475		33.469.000		106.167.300	- Keg	224.494.775	-	98,75	2 Keg	531.150.775	0,00	0,00	BPBD
								39.543.498.632,10		**7.797.560.100**		**5.812.836.405**		**830.516.060**		**1.641.807.988**		**1.036.301.069**		**2.039.595.369**		**5.548.220.486**		2.191		9.213.606.269	444	864	

b. Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian pelaksanaan program / kegiatan dengan target yang ditetapkan. Pencapaian target dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 yaitu secara umum untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 5.812.836.405,00** *(Lima milyard delapan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah)* dengan realisasi sebesar **Rp. 5.548.220.486,00** *(Lima milyard lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)* atau sebesar **95,45 %**, terhitung sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dana tersebut membiayai 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

(terlampir realisasi keuangan tahun 2022 ……..)

REALISASI KEUANGAN BPBD KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
						ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**5.812.836.405,00**	**5.548.220.486,00**	**95,45**
Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan propesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah				**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.196.989.974,00**	**4.011.490.206,00**	**95,58**
				Kegiatan :			
				1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**95.771.725,00**	**95.475.278,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jlh dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.101.825,00	27.060.303,00	99,85
	Jlh dokumen/laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.669.900,00	68.414.975,00	99,63
				Kegiatan :			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.803.358.757,00**	**2.641.498.997,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.755.879.707,00	2.594.273.197,00	94,14
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.303.675,00	4.285.000,00	99,57
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.175.375,00	42.940.800,00	99,46
				Kegiatan :			
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**383.370.086,00**	**383.119.381,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.392.100,00	46.386.280,00	99,99
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.306.350,00	89.270.750,00	99,96

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.299.736,00	23.279.943,00	99,92
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.125.000,00	34.125.000,00	100,00
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.328.900,00	57.311.025,00	99,97
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	6) Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.164.000,00	10.070.000,00	99,08
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.754.000,00	122.676.383,00	99,94
				Kegiatan :			
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**236.277.800,00**	**235.165.000,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	1) Pengadaan Mebel	20.825.000,00	20.645.000,00	99,14
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.442.800,00	114.392.000,00	99,96
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	3) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.010.000,00	100.128.000,00	99,13
				Kegiatan :			
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**182.443.356,00**	**172.564.567,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	80.209.596,00	74.622.551,00	93,03
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1	1	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.733.760,00	93.442.016,00	95,61
				Kegiatan :			
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**495.768.250,00**	**483.666.983,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.644.500,00	334.760.633,00	96,57
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.293.750,00	111.076.350,00	99,80
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.830.000,00	37.830.000,00	100,00

Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum				**II. Program Penanggulangan Bencana**	**1.615.846.431,00**	**1.536.730.280,00**	
				Kegiatan :			
				1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**219.157.330,00**	**218.679.694,00**	
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	450	450	1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	219.157.330,00	218.679.694,00	99,78
				Kegiatan :			
				2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**417.481.951,00**	**410.207.637,00**	**98,26**
				Sub Kegiatan :			
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100	100	1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	59.447.300,00	56.178.700,00	94,50
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2	2	2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	49.306.226,00	49.260.000,00	99,91
	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan	1	1	3) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	27.874.250,00	27.085.050,00	97,17
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	1	4) Penanganan Pasca Benca Kabupaten/Kota	227.332.175,00	224.494.775,00	98,75
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	50	5) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	53.522.000,00	53.189.112,00	99,38
				Kegiatan :			
				3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**979.207.150,00**	**907.842.949,00**	**92,71**
				Sub Kegiatan :			
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	1	1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	492.195.900,00	487.041.389,00	98,95

	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	37.491	27.502	2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	143.242.250,00	142.859.300,00	99,73
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	415	3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	343.769.000,00	277.942.260,00	80,85

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan berisikan capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Asahan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2022 sudah sepenuhnya 100%, berikut capaian kinerja BPBD Kabupaten Asahan :

1. Pada Indikator Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana dengan target 100% capainya 100%, dengan perhitungan berdasarkan pada jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%.
2. Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana yang tertangani dengan target 20,38% capaianya 21,45% dengan perhitungan berdasarkan pada jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%.
3. Pada Indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target 100% capainya 100%, dengan perhitungan berdasarkan pada jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terbaji dikali 100%.
4. Pada Indikator Tingkat Keterpaduan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan target 2,83% capaiannya 4,58%, dengan perhitungan berdasarkan pada jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam system manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)			166,99	166,98	166,97	166,96	167,20	146,85	146,85	146,85	SKOR TINGGI
2	Persentase Desa Tangguh Bencana.			4,52%	20,38	25,38	30,38	0,00%	21,45%	25,38	30,38	105,25%
3	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Keterpaduan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.			-	2,83%	2,83%	2,83%	-	4,58%	2.83%	2,83%	161,84%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kab.Asahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan memiliki unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Asahan yang bertugas membantu dan memberikan dukungan teknis Administrasi dan Operasional kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan meliputi Ketatausahaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pembinaan Tenaga Fungsional dan Satuan Tugas (SATGAS). Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan menyelenggaraan Fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efisiensi dan efektif;
2. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penyelenggaraan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
4. Penyelengaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
5. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kabupaten, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tidak terlepas dari berbagai permasalahan/isu-isu yang dihadapi. Permasalahan dan Isu-Isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan antara lain :

1. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Asahan;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Asahan;
4. Terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;

6. Belum terpenuhinya standar kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan :

1. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Asahan;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Asahan;
4. Terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
5. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
6. Belum terpenuhinya standar kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Solusi :

1. Menggunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin dengan mengutamakan kegiatan prioritas, Mengkordinasikan kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Melibatkan masyarakat yang ada di daerah, Meningkatkan edukasi kebencanaan untuk masyarakat dan dunia usahan.
3. Menyiapkan mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan secara lengkap dan jelas.
4. Menggunakan sarana peralatan pendukung yang tersedia dan terbatas.
5. Mengkordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lintas sektor dan lintas wilayah.
6. Memberikan pelatihan, BIMTEK, dan studi banding tentang kebencanaan pada sumber daya manusia.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen perencanaan dengan periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan perangkat daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi pedoman penyusunan Renja perangkat daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Asahan dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan disajikan dalam *tabel di bawah ini*.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Asahan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**A. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	10,305	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Asahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	70.502	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Asahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Lap	39,132	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Asahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Lap	50.000	
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2,343,172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	2.142.515	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,304	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	15,259	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	18 Laporan	39.976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	
C.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny	Kab. Asahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	31,181	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny	Kab. Asahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	55.000	
2	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	2.500	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Asahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Asahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
D.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,304	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi istrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.496	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,069	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.408	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17,739	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Asahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.998	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,125	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Asahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,045	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Asahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.001	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dok	15.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dok	8.316	
7	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Asaahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	51.200	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Asaahan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	65.901	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	87.896	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000	
E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Asahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang isediakan	1 Unit	22..500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Asahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang isediakan	-	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang isediakan	2 Unit/Jenis	50.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang isediakan	-	-	
F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.005	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	57,553	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	85.201	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	146,734	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	218.256	
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	276,766	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Asahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	332.023	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	69,967	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	115.500	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit/Jenis	37,830	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Asahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit/Jenis	104.470	
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					
A.	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**					**A. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**					
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	200.974	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	1.200.048	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	450 Orang	622.500	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Asahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	100 Orang	130.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					**B. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggula ngan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	50.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggula ngan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	100.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kawasan	52.497	
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	100.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	126.991	
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	138.431	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	222.000	
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pemba ngunan yang Mempu nyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dok	130,151	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pemba ngunan yang Mempu nyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Asahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	50.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Asahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	75.468	
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	100.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 Orang	233.991	
8	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	50.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	20 Orang	55.468	
9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dok	200.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Asahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Kel	25.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Asahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pela tihan Keluarga Tang gap Bencana Alam	100 Keluarga	85.318	
C	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**C. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Lap	10.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	-	-	
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dok	499,896	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetap kan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	367.322	
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	37.491 Orang	160,109	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	27.502 Orang	249.062	
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	289 Orang/ Paket	210,223	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang/ Paket	113.948	
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Asahan	umlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Lap	25.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Asahan	umlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Asahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dok	25.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Kab. Asahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**					**D. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**					
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dok	10.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 Dok	50,000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 Dok	75.065	
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dok	25.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Asahan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dok	10.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Asahan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Asahan	Jumlah Laporan Hasill Binwas Penyelengga raan Penanggulangan Bencana	1 Lap	10.000	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-	-	
6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencanan (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dok	215,392	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota.	Kab. Asahan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	1.423.660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Asahan	Jumlah Keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	-	-	
8						Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kab/Kota	Kab. Asahan	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dari beberapa program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terdampak bencana bertujuan untuk penanganan bencana yang bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntable, baik pada tahap pra bencana (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Adapun usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Asahan Tahun 2024, sbb :

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Permendagri	SIPD				
1	2	3	4	5	6	7
	N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabpaten Asahan hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Sinergitas dan harmonisasi diperlukan dan harus dilakukan di dalam kerangka percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tentunya juga prioritas daerah. Sebagaimana perintah Presiden diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM maka diusulkan di dalam RKP Tahun 2020 adalah peningkatan SDM. Upaya pertumbuhan kualitas SDM salah satunya masuk pada 5 Prioritas Nasional. Prioritas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPBD yaitu Prioritas Pertama dan Prioritas Kedua :

1. **Pertama**, pembangunan manusia yaitu dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, kemudian juga kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi, kemudian peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman serta peningkatan pelayanan dasar, dimana peningkatan pelayanan dasar telah pula diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. **Kedua**, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan

Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penangulangan bencana alam, dan peningkatan sistem logistik. Dalam RPJMN 2020-2024 untuk prioritas nasional meningkatkan ketahanan terhadap bencana ditetapkan sasaran dan target nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dengan target meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan :

1) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.

a. Tujuan.

Tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk menjabarkan dan mengimplementasikan misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana :
  1. Meningkatkan upaya pengenalan dan pengkajian terhadap ancaman bencana.
  2. Meningkatkan pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
  3. Menganalisis kemungkinan dampak bencana.
  4. Meningkatkan tindakan pengurangan resiko akibat bencana.

5. Menentukan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.
6. Mengalokasikan tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- Melaksanakan rencana penanggulangan bencana sedini mungkin.
- Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan instansi/lembaga terkait.
- Melakukan aksi tanggap darurat bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta rehabilitasi dalam rekonstruksi Pasca Bencana.

b. Sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

- Terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan preventif, mitigasi dan koordinatif.
- Terlaksananya aksi tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Terlaksananya rehabilitasi yang merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- Terlaksananya Rekonstruksi yang merupakan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Asahan Tahun 2024 terdiri dari Program dan Kegiatan, sedangkan untuk mencapai sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan
1	2	3
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2.	Penanggulangan Bencana.	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsaigaan Terhadap Bencana. 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai / dihasilkan dari Rencana Kerja (Renja) ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, adapun rinciannya sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kondusifitas daerah	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	1. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	166,96
			2. Tingkat penanganan penanggulangan bencana.	100 %
			3. Persentase desa tangguh bencana.	30,38 %
			4. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100 %
			5. Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana.	2,83 %

4.3 Alokasi Anggaran.

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan 2021-2026.

(Lampiran : Program & Kegiatan T.A 2024 yang direncanakan beserta Prakiraan Maju Tahun 2025)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.605.276.056,61**							**6.689.104.922,33**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.605.276.056,61**							**6.689.104.922,33**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**6.605.276.056,61**							**6.689.104.922,33**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	**-**			**100 Persen**	**3.587.598.920,61**						**-**	**3.725.588.720,33**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			11 Dokumen	49.437.875,00			-	-	-	-	49.437.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.304.950,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.304.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	39.132.925,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.132.925,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			4 Jenis	2.365.235.005,00			-	-	-	-	2.365.235.005,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.343.171.955,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.343.171.955,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.303.675,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.303.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	15.259.375,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.259.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			5 Jenis	138.681.250,00			-	-	-	-	138.681.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	31.181.250,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.181.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	40.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	15.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			8 Jenis	258.394.587,61			-	-	-	-	253.894.587,33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.304.444,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.304.444,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.068.875,61	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.068.875,33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.739.308,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.739.308,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.125.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.045.010,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.045.010,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.015.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.015.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	51.200.950,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.200.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	87.896.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.396.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Jenis	172.500.000,00			-	-	-	-	307.489.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	22.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		152.489.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Jenis	218.787.008,00			-	-	-	-	218.787.008,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	57.553.248,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.553.248,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	146.733.760,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		146.733.760,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Jenis	384.563.195,00			-	-	-	-	392.063.195,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	276.766.450,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		284.266.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	69.966.745,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.966.745,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	37.830.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.830.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Indeks Risiko Bencana***	**-**			**166,96 Skor**	**3.017.677.136,00**						**-**	**2.963.516.202,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana*	-			100 Persen	723.474.082,00			-	-	-	-	823.474.082,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	200.974.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.974.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	522.500.082,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		622.500.082,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Desa Tangguh Benana*	-			30,38 Persen	943.581.919,00			-	-	-	-	805.150.931,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				50 Orang	100.000.075,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.075,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				50 Orang	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				25 Keluarga	25.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	130.150.856,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.150.856,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	138.430.988,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	100.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	100.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			100 Persen	930.228.750,00			-	-	-	-	935.228.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	499.896.200,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		499.896.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				27502 Orang	160.109.500,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.109.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				289 Orang	210.223.050,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.223.050,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Tingkat Keterpaduan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			2,83 Persen	420.392.385,00			-	-	-	-	399.662.439,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	50.000.110,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.110,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.270.054,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lembaga	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	215.392.275,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.392.275,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**6.605.276.056,61**							**6.689.104.922,33**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergi dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan untuk mencapai sasaran perencanaan sesuai dengan yang diharapkan.

Kisaran, 28 Juli 2023.

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.ASAHAN,

HARRY NALDO TAMBUNAN, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 19641224 199003 1 004.

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani No. Telepon / Fax (0623) 347924
K I S A R A N

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 100.3.3/292/BPBD/2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 28 Juli 2023.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ASAHAN,

HARRY NALDO TAMBUNAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19641224 199003 1 004

Tembusan :

Bupati Asahan sebagai laporan

SALINAN



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

BAB III

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

Pasal 3

RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

(2) RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 5

RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

(1) Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

(2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2024 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 22